

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Alting, Husen, 2010, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.

Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2013, *Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif*, Direktorat Perlindungan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas.

Fauzi, Noer, 1999, *Petani & Penguasa (Dinamika Perjalanan Agraria Indonesia)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Harsono, Boedi, 1997, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid 1, Cetakan Ketujuh Edisi Revisi, Djambatan, Bandung.

Konsorsium Pembaruan Agraria, 2018, *Catatan Akhir Tahun 2018, Masa Depan Reforma Agraria Melampaui Tahun Politik*.

Kantor Staf Presiden, 2016, *Strategi Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria 2016-2019*.

Limbong, Berharnhard, 2012, *Reforma Agraria*, MP Pustaka Margaritha.

Mahmud, Peter Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.

Mangkasa, Oswar, 2014, *Reforma Agraria Sejarah, Konsep, dan Implementasinya*, Buletin Agraria Idonesia Edisi I, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas.

Mu'adi, Sholih, 2010, *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan dengan cara Litigasi dan Non Litigasi*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta.

Parlindungan, A.P, 1991, *Komentat Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, PT. Mandar Maju, Bandung.

Sembiring, Rosnidar, 2017, *Hukum Pertanahan Adat*, PT RajaGrafindo Persada, Depok.

Simarmata, Rikardo, 2006, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, UNDP Regional Centre, Bangkok.

Soeprapto, R, 1966, *Undang-Undang Agraria dalam Praktik*, Mitra Sari, Jakarta.

Soekanto. Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Sumardjono, Maria, et al, 2008, *Mediasi Sengketa Tanah: Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Bidang Pertanahan*, Kompas, Jakarta.

Wiradi, Gunawan, 2009, *Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir*, Sajogyo Institute, Akatiga, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Bogor.

Penulisan Hukum:

Kenny Cetera, 2017, “*Tinjauan Yuridis Integrasi Peta Dalam Pemberian Hak Guna Usaha Di Atas Tanah Gambut Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Di Provinsi Kalimantan Barat*”, Tesis, S2 Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Yusak Christian, 2015, “*Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Lahan Antara Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) Dengan Hak Guna Usaha (HGU)*”, Tesis, S2 Ilmu Hukum Jakarta Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Simarmata, Rikardo, *Menyongsong Berakhirnya Abad Masyarakat Adat: Resistensi Pengakuan Bersyarat*, tulisan ini disampaikan pada ‘*International Advocacy and Capacity Building for Indigenous Peoples in Indonesia*’ yang diselenggarakan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara di Denpasar 6-9 September 2004.

Taqwaddin, 2010, “*Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh*”, Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Putusan Pengadilan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 perihal Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap UUD NRI Tahun 1945, 21 Desember 2004.

Perjanjian Internasional:

Konvensi ILO 169 tahun 1989 mengenai Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat di Negara-Negara Merdeka (*Concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent States*)

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001
tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;

Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954 tentang Pemakaian Tanah Perkebunan
oleh Rakyat;

Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir;

Undang-Undang Nomor 86 tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan
Milik Belanda;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
(UUPA);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah Dan
Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta
Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria;

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan
Perkebunan Kelapa Sawit;

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan
Kelapa Sawit Berkelanjutan;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1959 tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda;

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan;

Internet:

Eko Sulisty, Nawacita Reforma Agraria, <http://ksp.go.id/nawacita-reforma-agraria/>, diakses tanggal 27 November 2019.

Ada Achmad, *Perpres Reforma Agraria Telah Terbit, Begini Isinya*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bb87956d3684/perpres-reforma-agraria-telah-terbit--begini-isinya/>, diakses tanggal 27 November 2019.

Henry Campbell Black, M.A. *Black's Law Dictionary*, <http://heimatundrecht.de/sites/default/files/dokumente/Black%27sLaw4th.pdf>, hlm 1019, diakses tanggal 27 November 2019

Maria Rosari, HuMa: masyarakat adat masih jadi korban konflik SDA, agrarian, <https://m.antaranews.com/berita/796628/huma-masyarakat-adat-masih-jadi-korban-konflik-sda-agraria/>, diakses tanggal 27 November 2019

Obbie Afri Gultom, 2014, Sanksi Tidak Memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) Dalam Usaha Perkebunan, dalam www.gultomlawconsultants.com/category/hukum/, diakses tanggal 20 oktober 2019.

Yuliana Ratnasari, *Penetapan Desa Adat Masih Terhambat Peraturan Daerah*, <https://tirto.id/penetapan-des-a-dat-masih-terhambat-peraturan-daerah-ckQs>, diakses tanggal 7 Januari 2020.